

PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT MADANI

Ismatul Izzah¹

¹ Institut Agama Islam Zainul Hasan Genggong, Kraksaan, Probolinggo
Email: ismaizza83@gmail.com

Abstract

The sophistication of a nation and the State can not be separated from the progress of society. High civilized society and modern must be different from primitive society, not cultured and layman. High civilized society or civil society is not just this discourse appears, there are some things that background. Thus, this is where Islamic religious education takes a role in its formation. In the midst of the times, new phenomena are emerging in society, and this is certainly influenced by the development of science and technology. Islamic education amidst the onslaught of public education, tetpa strives to exist with several developments and innovations for its advancement in making changes to the customs, culture and patterns of the society by maintaining tolerance of Religion, living in mutual respect and help, forming a knowledgeable society and technological literacy, so in this case that need to be underlined is the role of Islamic religious education, civil society and character education.

Keywords: Role, Islamic Religious Education, Civil Society

Pendahuluan

Pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, maka Islam sebagai Agama yang *rahmatan lil alamin*, memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia (Baharun, 2016). Seiring dengan adanya perkembangan globalisasi yang sedang berlangsung saat ini, mau tidak mau ada dampak bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi telah membat habis batas-batas yang mengisolasi kehidupan manusia. Karena itu, lahirlah masyarakat yang terbuka (*open society*), dimana terjadi aliran bebas informasi, yakni manusia, perdagangan, serta berbagai bentuk-bentuk aktivitas kehidupan global lainnya yang dapat menyatukan manusia dari berbagai penjuru dunia. Karena itu, masyarakat Indonesia mempunyai karakter tersendiri yang menjadi ciri khas dan berbeda dengan negara lain-nya, antara lain; 1) keberagaman, 2) sikap saling pengertian, 3) toleransi 4) sanksi moral (Fauzi, 2018b). Karakteristik ini diharapkan dapat mewarnai kehidupan sosial masyarakat Indonesia, sehingga dapat melahirkan masyarakat madani.

Demikian Islam sebagai agama menduduki posisi sentral dalam kehidupan miliaran, dan terbukti tangguh menghadapi gempuran baik atheisme maupun sekularisme. Namun, perwujudan sebagai sebuah peradaban tengah mengalami krisis monumental. Bertubi-tubi peradaban Islam menerima pukulan yang menggoyahkan, terutama ekspansi dari Barat, modernitas dan terakhir adalah globalisasi (Allawi, 2009). Di tengah perkembangan zaman, fenomena perilaku amoral peserta didik yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, seperti seks bebas, kekerasan, pornografi, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, tawuran, *bullying* baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap guru maupun teman sebaya (Baharun, 2017). Beberapa *impact* yang lahir sejalan dengan arus globalisasi meliputi; 1) kecenderungan negatif generasi muda dalam interaksi sosial, (2) melemahnya rasa sosial dan empati, dan (3) maraknya konflik sosial di masyarakat (Bali, 2015). Bahkan beberapa kasus seperti korupsi dan manipulasi yang prevalensinya banyak melibatkan orang-orang terdidik dan terpelajar, hal ini menjadi teguran keras dunia pendidikan yang seharusnya melahirkan generasi-generasi terdidik dan beretika (Mundiri, 2017)

Fenomena-fenomena perilaku amoral tersebut menjadi kekhawatiran para tokoh-dunia, seperti Martin Luther King mengatakan bahwa "*intelligence plus character that is the goal of true education* (kecerdasan plus karakter itu

merupakan sebuah tujuan akhir dari pendidikan)", sebagaimana Mahatma Gandhi menjelaskan tentang salah satu tujuh dosa fatal "*education without character* (pendidikan tanpa karakter)". Juga Theodore Roosevelt yang mengatakan "*To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society* (mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman bahaya kepada masyarakat)". Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, dengan pendidikan yang berpilar kepada cipta, rasa dan karsa, dapat mempunyai arti pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan (*knowledge*) tetapi juga mengasah afeksi moral sehingga dapat menghasilkan karya bagi kepentingan umat manusia. Faktor utamanya adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga mengajarkan kepada individu cara berbahasa, berperilaku, dan memberikan kasih sayang. Sehingga seseorang memiliki daya mental yang lebih baik dan kesehatan emosi yang lebih akseptabel dengan cara mengembangkan kepercayaan diri dan perasaan realitis serta menumbuhkan empati kepada orang lain (Mushfi & Iq, 2017).

Berdasarkan latar belakang fenomena dan pendapat para tokoh tersebut, dunia pendidikan saat ini berusaha mengevaluasi sistem pembelajarannya untuk menghasilkan manusia berkarakter. Proses pencarian jati diri sistem pendidikan di Indonesia yang merupakan arah untuk mencapai keseimbangan atau kondisi *homeostatic* yang relatif sebagaimana setiap manusia mempunyai keinginan untuk mencapainya. Di sinilah peran sekolah, madrasah, dan guru sebagai institusi pendidikan formal sebagai posisi yang tertantang dalam menghadapi fenomena yang berkaitan dengan globalisasi dan degradasi moral dalam mewujudkan masyarakat madani (Fauzi, 2015a).

Potret Pendidikan Islam dalam Membentuk Masyarakat Madani

Pendidikan Islam dengan istilah *Islamic Studies*, secara sederhana dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dengan perkataan lain usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk beluk yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Muhaimin, 2005). Metode-metode dalam pendidikan Islam bukan hanya transformasi ilmu pengetahuan, tetapi juga meningkatkan dan meninggikan moral/akhlak (Bali, 2017). Menurut Ahmad Syalabi, istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu pada term *al-terbiyah*, *al-ta'dib* dan *al-ta'lim*. Dari ketiga istilah tersebut term yang populer

digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah term *al-tarbiyah*. Sedangkan term *al-ta'dib al-ta'lim* jarang digunakan. Padahal kedua istilah tersebut digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam (Ahmad Sya'labi, 1945). Kata *al-Tarbiyah* berasal dari kata *rabb*. Walaupun kata ini memiliki banyak arti akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan arti tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya (Ibn Abdullah Muhammad bin Ahmad al-ansyari al-Qurthuby; 1990).

Dalam penjelasan kata *al-Tarbiyah* berasal dari tiga kata, yaitu: Pertama, *rabba-yarbu* yang berarti bertambah, tumbuh bahkan dapat berkembang sesuai dengan Q.S. Al Rûm/30:39. Kedua, kata *rabiya-yarba* berarti menjadi besar. Ketiga, *rabba-yarubbu* berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun dan memelihara (Abdurrahman an-Nahlawi; 1992). Kata *rabb* yang terdapat dalam Q.S. Al-Fatihah 1:2 (*alhamdu lil Allahi rabb al-alamin*) mempunyai kandungan arti yang berkonotasi dengan istilah *al-Tarbiyah*. Sebab kata *rabb* (Tuhan) dan *murabbi* (pendidik) berasal dari akar kata yang sama. Berdasarkan hal ini, Allah adalah pendidik yang Maha Agung bagi seluruh alam semesta (Al-Syaibani, 1979). Penggunaan term *al-Tarbiyah* untuk menunjuk makna pendidikan Islam dapat difahami dengan merujuk dalam Q.S Al Israa ayat; 17-24: *Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.*

Berangkat dari pengertian di atas, secara filosofis mengisyaratkan bahwa proses pendidikan Islam adalah bersumber pada pendidikan yang diberikan Allah sebagai "pendidik" seluruh ciptaan-Nya. Dalam konteks yang luas, pengertian pendidikan Islam yang dikandung dalam term *al-tarbiyah* terdiri atas empat unsur pendekatan, yaitu: 1) memelihara, menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa (*baligh*). (2) mengembangkan seluruh potensi, 3) mengarahkan seluruh fitrah individu. 4) melaksanakan pendidikan secara bertahap (An-Nahlawi:1992), sedangkan istilah *al-Ta'lim* sudah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kata ini lebih umum dibanding dengan *al-Tarbiyah* maupun *al-ta'dib*. Menurut Rasyid Ridha mengartikan *al-Ta'lim* sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan. Menurut Rasyid Ridha, kata *al-Ta'lim* didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah, ayat: 151. Pada kalimat *wa yu'allimuhum al-kitab wa al-hikmah* dalam ayat tersebut menjelaskan tentang aktivitas Rasulullah mengajarkan tilawat al-Qur'an kepada kaum muslimin. Menurut Abdul Fatah Jalal menjelaskan bahwa, apa yang dilakukan Rasulullah

bukan hanya sekedar membuat Islam bisa membaca, melainkan membawa setiap manusia kepada nilai pendidikan *tazkiyah an-nafs*, sehingga memungkinkannya menerima *al-hikmah* serta mempelajari segala yang bermanfaat untuk diketahui. Karena itu, makna *al-ta'lim* tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang lahiriyah akan tetapi mencakup pengetahuan teoritis dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan; perintah untuk melaksanakan pengetahuan dan sebagai pedoman hidupnya (Abdul Fatah Jalal, 1988).

Menurut Muhammad Nuquib al-Attas, istilah untuk menunjukkan pendidikan Islam adalah *al-ta'dib*, artinya pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kedalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Dengan pendekatan ini, pendidikan berfungsi sebagai pembimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadiannya. Dengan demikian, istilah *al-Ta'dib* merupakan term yang paling tepat dalam khazanah bahasa Arab mengandung arti ilmu, kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran dan pengasuhan yang baik sehingga makna *al-Tarbiyah* dan *al-Ta'lim* sudah tercakup dalam term *al-Ta'dib* (Nuquib Al-Attas;1994).

Terlepas dari perdebatan makna dari ketiga term diatas secara terminology, para ahli pendidikan Islam merumuskan, menurut Ahmad Marimba; mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadiannya *insan kamil* (Ahmad Marimba, 1989), sedangkan Muhammad Fadhil Al-Jamaly; mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan serta mengajak peserta didik lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi untuk kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang sempurna, baik berkaitan dengan potensi akal, perasaan maupun perbuatannya (Muhammad Fadhil Al-Jamaly, 1977). Sedangkan Al-Syaibaniy berpendapat pendidikan Islam adalah proses mengubah perilaku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi dalam masyarakat, sementara Ahmad Tafsir; mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam (Ahmad Tafsir, 1992). Demikian potret pendidikan Islam

sebagai sistem yang memungkinkan seseorang peserta didik, untuk mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan ini, peserta didik akan dapat dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam yang diyakininya sehingga akan terbentuk kepribadian yang utama yakni Insan Kamil.

Paradigma Masyarakat Madani

Paradigma masyarakat madani dalam perspektif, Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri Malaysia adalah orang yang pertama kali memunculkan istilah masyarakat madani di Indonesia sebagaimana dikutip Dawam Rahardjo di dalam buku Kamaruddin Hidayat. Masyarakat Madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu (Kamaruddin Hidayat dan Azzumardi Azzra: 2006). Ciri-ciri masyarakat madani menurut Anwar Ibrahim memiliki hubungan timbal balik (*reprocity*), kemajemukan budaya, dan sikap saling memahami dan menghargai (Fauzi, 2018). Lebih lanjut Anwar Ibrahim menegaskan bahwa karakter masyarakat madani merupakan *Guiding Ideas*, dengan meminjam istilah Bannabai, dalam melaksanakan ide-ide yang mendasari msyarakat madani, yaitu prinsip moral, keadilan, keseksamaan, musyawarah dan demokrasi.(Mundiri, 2016)

Kamaruddin Hidayat sebagaimana dikutip Dawam Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Selanjutnya Dawam menjelaskan, dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Menurut Azyumardi Azra, masyarakat madani mempunyai arti lebih dari sekedar gerakan pro-demokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas dan bertamadun (*civility*). Dari pandangan di atas, Nurcholish Nadjid menegaskan, makna masyarakat madani berakar dari kata "*civility*" mengandung makna toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial. Makna *Civil Society* "Masyarakat sipil" adalah terjemahan dari *Civil Society*. Konsep *Civil Society* lahir dan berkembang dari sejarah

pergumulan masyarakat. Secara historis, istilah *Civil Society* berakar dari pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John Locke, dan Hubbes. Ketiga orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian kekuasaan monarki-absolut dan ortodoksi gereja, (Endang Rudiatin Sosroediroe, 2007). Cicero adalah orang Barat yang pertama kali menggunakan kata *Societies Civilis* dalam filsafat politiknya. Konsep *Civil Society* pertama kali dipahami sebagai negara (state).

Perbedaan antara *Civil Society* dan masyarakat madani adalah *Civil Society* merupakan buah modernitas (Fauzi, 2018), sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans; gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga *civil society* mempunyai moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan. Perbedaan lain, asyarakat Madani dan *Civil Society* sebagaimana telah dikemukakan di atas, masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsep di luar menjadi "Islami". Menilik dari substansi *Civil Society* lalu membandingkannya dengan tatanan masyarakat Madinah yang dijadikan pembenaran atas pembentukan *Civil Society* di masyarakat Muslim modern akan ditemukan persamaan sekaligus perbedaan di antara keduanya. Menurut Syafii Maarif sebagaimana yang dikutip oleh M. Din Syamsuddin, mendefinisikan masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah SWT (Din Syamsuddin, 2002). Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Allah SWT memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Q.S. Saba' ayat 15: *Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun"*.

Sejarah Masyarakat Madani

Berdasarkan sejarah, terdapat dua masyarakat yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu: a) Bangsa/masyarakat Saba', kaumnya nabi Sulaiman AS., b) Masyarakat madinah. Masyarakat madinah terdokumentasi sebagai masyarakat madani setelah terjadinya traktat, perjanjian madinah

antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian madinah berisi tentang kesepakatan ketiga unsure masyarakat untuk saling tolong menolong, menjadikan Al-qur'an sebagai pedoman dan konstitusi, menjadikan kedamaian dalam kehidupan social, menjadikan Rasulullah Saw sebagai pemimpin, dan member kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianutnya.

Demikian beberapa karakteristik masyarakat madani (Deni Suito, 2006), antara lain: a) terjadinya integrasi antara individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak social dan aliansi social, b) menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan mendominasi di masyarakat dapat dikurangi oleh kepentingan alternative, c) program Negara yang mendominasi seperti, pembangunan yang berbasis masyarakat, d) masyarakat mampu memberikan masukan terhadap keputusan pemerintah melalui keanggotaan organisasi volunteer (benyuk kerelawanan seseorang), e) kreatifitas masyarakat tumbuh dan berkembang yang semula terhambat oleh rezim-rezim totaliter, f) meluasnya kesetiaan, loyalitas dan kepercayaan sehingga individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain. g) masyarakat bebas melakukan kegiatan melalui kegiatan di lembaga social dengan berbagai perspektif, h) masyarakat beragama, masyarakat tersebut mengakui adanya Tuhan, melaksanakan ajaran Tuhan yang mengatur kehidupan social dan beragama meskipun dalam satu daerah ada keberagaman agama, i) menjaga kedamaian; artinya masing-masing elemen masyarakat saling menghormati baik secara individu maupun kelompok (Ahmad, 2017), j) tolong menolong tanpa mencampuri urusan orang lain, k) toleran; menghormati dengan tidak mencampuri urusan pribadi agama orang lain.

Berdasarkan karakteristik di atas, dapat dikatakan masyarakat madani adalah sebuah masyarakat yang demokratis, dimana anggota masyarakat menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingannya, dimana pemerintah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program pembangunan. Pembentukan masyarakat madani dari proses sejarah yang panjang dan perjuangan terus menerus dari masyarakat yang tidak berbudaya menuju masyarakat yang beradaban tinggi. Secara universal terdapat beberapa hal untuk mewujudkan masyarakat madani, antara lain: 1) berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif

bagi terbentuknya kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok (Fauzi, 2016). 2) terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat, 3) terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga ekonomi, hukum, sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial, 4) tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial, 5) adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya (Anen Sutianto, 2004).

Demikian beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam mewujudkan masyarakat madani. Tanpa prasyarat tersebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat "*sipilisme*" yang sempit yang tidak ubahnya dengan faham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia (Fauzi, 2018), Konsep Masyarakat Madani semula dimunculkan sebagai jawaban atas usulan untuk meletakkan peran agama ke dalam suatu masyarakat Multikultural, yang merupakan produk dari proses demokratisasi di negeri ini yang sedang berlangsung terus menerus yang kemudian memunculkan ide pluralistik dan implikasinya kesetaraan hak individual. Perlu kita pahami, perbincangan seputar Masyarakat Madani sudah ada sejak tahun 1990-an, akan tetapi sampai saat ini, masyarakat Madani lebih diterjemahkan sebagai masyarakat sipil oleh beberapa pakar Sosiologi. Untuk lebih jelasnya, kita perlu menganalisa secara historis kemunculan masyarakat Madani dan kemunculan istilah masyarakat Sipil, agar lebih akurat membahas tentang peran pendidikan islam dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Namun, pada kenyataannya masyarakat sipil tidak sama dengan masyarakat Madani.

Menurut Nuquib Al-attas mengatakan bahwa, masyarakat madani merujuk kepada sebuah masyarakat dan negara yang diatur oleh hukum agama, sedangkan masyarakat sipil merujuk kepada komponen di luar negara. Syed Farid al-Atas seorang sosiolog sepakat dengan Syed M. Al Naquib Al Attas (berbeda dengan para sosiolog umumnya), menyatakan bahwa faham masyarakat Madani tidak sama dengan faham masyarakat sipil. Istilah Madani, Madinah dan din (diterjemahkan sebagai agama) semuanya didasarkan dari akar kata din. Kenyataan bahwa nama kota Yathrib berubah menjadi Madinah bermakna disanalah *din* berlaku. Secara historispun masyarakat Sipil dan

masyarakat Madani tidak memiliki hubungan sama sekali. Masyarakat Madani bermula dari perjuangan Nabi Muhammad SAW menghadapi kondisi jahiliyyah masyarakat Arab Quraisy di Makkah. Beliau memperjuangkan kedaulatan, agar ummatnya leluasa menjalankan syari'at agama di bawah perlindungan hukum (Nuqquib Al-Attas, 65).

Masyarakat madani sejatinya bukanlah konsep yang eksklusif dan dipandang sebagai dokumen usang. Ia merupakan konsep yang senantiasa hidup dan dapat berkembang dalam setiap ruang dan waktu. Mengingat landasan dan motivasi utama dalam masyarakat madani adalah Al-Qur'an. Meski Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung bentuk masyarakat yang ideal namun tetap memberikan arahan atau petunjuk mengenai prinsip-prinsip dasar dan pilar-pilar yang terkandung dalam sebuah masyarakat yang baik. Secara faktual, sebagai cerminan masyarakat yang ideal kita dapat meneladani perjuangan Rasulullah mendirikan dan menumbuhkembangkan konsep masyarakat madani di Madinah. Prinsip terciptanya masyarakat madani bermula sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. beserta para pengikutnya dari Makkah ke Yatsrib. Hal tersebut terlihat dari tujuan hijrah sebagai sebuah refleksi gerakan penyelamatan akidah dan sikap optimisme dalam mewujudkan cita-cita membentuk masyarakat yang *madaniyyah* (beradab).

Selang dua tahun pasca ahijrah atau tepatnya 624 M, setelah Rasulullah mempelajari karakteristik dan struktur masyarakat di Madinah yang cukup plural, beliau kemudian melakukan beberapa perubahan sosial. Salah satu di antaranya adalah mengikat perjanjian solidaritas untuk membangun dan mempertahankan sistem sosial yang baru. Sebuah ikatan perjanjian antara berbagai suku, ras, dan etnis seperti Bani Qainuqa, Bani Auf, Bani al-Najjar dan lainnya yang beragam saat itu, juga termasuk Yahudi dan Nasrani. Dari penjelasan di atas, setidaknya ada tiga karakteristik dasar terbentuknya masyarakat madani. *Pertama*, diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau, pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi dalam pandangan Alquran. Pluralitas juga pada dasarnya merupakan ketentuan Allah SWT, sebagaimana tertuang dalam Alquran surat Al-Hujurat (49) ayat 13., 2) Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang sifatnya kodrati (*given*) dalam kehidupan.

Dalam ajaran Islam, pluralisme merupakan karunia Allah yang bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis. Ia (*pluralitas*) juga merupakan sumber dan motivator terwujudnya vividitas

keaktivitas (penggambaran hidup) yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. 3) Satu hal yang menjadi catatan penting ialah sebuah peradaban yang kosmopolit akan tercipta manakala umat Islam memiliki sikap inklusif dan mempunyai kemampuan (*ability*) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, dengan catatan identitas sejati atas parameter-parameter autentik agama tetap terjaga, 4) *Kedua*, adalah tingginya sikap toleransi (*tasamuh*). Baik terhadap saudara sesama Muslim maupun terhadap saudara non-Muslim. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Senada dengan hal itu, Quraish Shihab sebagaimana yang dikutip oleh Kamarudin Hidayat, menyatakan bahwa tujuan Islam tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama.

Namun juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup, berdampingan seiring dan saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana hal itu pernah dicontohkan Rasulullah di Madinah (Azzumardi Azzra, 1999). Setidaknya landasan normatif dari sikap toleransi dapat kita tilik dalam firman Allah yang termaktub dalam surat Al-An'am: 108. *Ketiga*, adalah tegaknya prinsip demokrasi atau dalam dunia Islam lebih dikenal dengan istilah musyawarah. Terlepas dari perdebatan mengenai perbedaan konsep demokrasi dengan musyawarah, saya memandang dalam arti membatasi hanya pada wilayah terminologi saja, tidak lebih. Mengingat di dalam Al-Qur'an juga terdapat nilai-nilai demokrasi (surat As-Syura:38, Surat Al-Mujadilah:11). Ketiga prinsip dasar setidaknya menjadi refleksi bagi kita yang menginginkan terwujudnya sebuah tatanan sosial masyarakat madani dalam konteks hari ini. Paling tidak hal tersebut menjadi modal dasar untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan (Fauzi, 2017b).

Pengertian Pendidikan Karakter

Pada hakikatnya, pendidikan adalah suatu proses yang berlangsung secara kontinu dan kesinambungan. Pendidikan haruslah merefleksikan kebutuhan dasar manusia agar ia layak dan cukup intelegen hidup dalam lingkungannya (Baharun, 2012). Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia (Bali, 2013). Islam mengajarkan bahwa pendidik pertama dan utama adalah orang tua sendiri yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anaknya, Firman Allah SWT (QS. 66.6), "*Hai orang-orang yang beriman, periharalah diri dan keluargamu dari api neraka*".

Mengingat keterbatasan orang tua dalam memberikan pendidikan di rumah karena harus mencari nafkah untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, maka orang tua kemudian menyerahkan anaknya kepada pendidik di sekolah untuk mendidik. Para pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak (Arifuddin Arif, 2008). Sekolah mempunyai peranan penting dalam pembentukan baik kepribadian, sikap, karakter dan peningkatan prestasi akademik. Sekolah adalah tempat terjadinya proses belajar mengajar. Adanya interaksi antara pendidik dengan siswa. Dengan berlangsungnya proses yang kontinu dan berkesinambungan, secara tidak langsung karakter atau kepribadian anak.

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak”. Menurut Tadkiroatun Musfiroh, karakter mengacu kepada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (*skills*). Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “*to mark*” atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia (Kemendiknas, 2010).

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “*the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development*”. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Di samping, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter. Menurut Ramli pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik,

warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya (Muali, 2017). Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai *the deliberate us of all dimensions of school life to foster optimal character development* (usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan madrasah untuk membentuk karakter secara optimal).

Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Masyarakat Madani

Sebelum membentuk masyarakat madani, terlebih dahulu perlu memetakan peran pendidikan agama Islam dengan analisis SWOT, dengan mengetahui peluang dan tantangannya, serta kekuatan dan kelemahannya, pendidikan Islam dapat memposisikan diri secara tepat dalam pergaulan sosio kultural. Berikut ini akan dipaparkan sejumlah kelemahan yang sekaligus merupakan tantangan yang harus dibenahi oleh pendidikan Islam antara lain sebagai berikut: a) citra lembaga dan kualitas pendidikan Islam *relative* rendah (Fauzi, 2017), sebagai sebuah kenyataan bahwa dalam ranking kelulusan lembaga pendidikan Islam umumnya berada didalam urutan dibawah sekolah umum, b) kualitas dan kuantitas guru yang belum memadai, yang merupakan kunci keberhasilan dalam pendidikan. Karena itu, apabila guru kualitasnya rendah dan rasio siswa tidak memadai, maka out put pendidikannya dengan sendirinya akan rendah pula, c) gaji guru secara umum masih kecil, d) tuntutan kompetisi dan kompetensi yang semakin meningkat, e) harapan masyarakat terhadap pendidikan Islam agar dapat melahirkan orang-orang yang intelek, tetapi alim dan orang-orang alim yang intelek, harapan ini yang harus dijawab dengan sungguh-sungguh dan terus menerus mengupayakan kualitas lembaga pendidikan Islam yang terus meningkat (Bambang Pranowo, 2011).

Meskipun didapati kelemahan dan tantangan yang dihadapi lembaga-lembaga pendidikan Islam cukup berat, tetapi jika kita mengamati secara seksama terdapat sejumlah alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa

peluang lembaga pendidikan Islam dimasa mendatang tetap cukup besar, bahkan mungkin semakin besar. Peluang tersebut dimungkinkan dan didukung oleh sejumlah kondisi sebagai berikut: 1) potret masyarakat Indonesia adalah agamis. Kondisi semacam ini merupakan pondasi yang cukup kokoh bagi kehidupan lembaga pendidikan Islam, karena keinginan masyarakat yang cukup kuat untuk memiliki anak yang selain berilmu juga taat beragama. 2) meningkatkan kesadaran beragama dikalangan masyarakat yang semula dikategorikan sebagai Islam formal. Peningkatan kesadaran beragama tersebut dengan sendirinya diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan Islam bagi anak-anak mereka. 3) pendidikan Islam, posisi madrasah yang semakin mantap seiring dengan lahirnya undang-undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pendidikan seperti madrasah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. 4) Keimanan dan ketaqwaan semakin menempati posisi yang setrategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, setiap langkah pembangunan bangsa harus dijiwai oleh nilai-nilai agama. 5) meningkatnya status sosial-politik kalangan santri pada masa ini banyak sekali elit politik, birokrat maupun tokoh masyarakat yang berasal dari kalangan santri. Hal ini secara tidak langsung juga berdampak positif bagi meningkatnya perhatian dan penghargaan terhadap lembaga pendidikan Islam (Fauzi, 2015). 6) meningkatnya kualitas pendidikan Islam, seperti madrasah dan sekolah Islam berkualitas rendah, namun beberapa madrasah ternyata mengungguli lembaga pendidikan atau sekolah umum.

Melihat tantangan dan peluang yang dimiliki pendidikan Islam yakni dalam rangka mempersiapkan peserta didiknya menghadapi tantangan yang semakin berat pada millenium ketiga ini, adalah melakukan reformasi pendidikan Islam sedemikian rupa sehingga menu pendidikan Islam yang diberikan mampu menunjang proses reproduksi dan revitalisasi. Lebih lanjut menurut Baharudin dikatakan bahwa reformasi pendidikan yang dilakukan dalam rangka menyiapkan diri di millenium ketiga ini meliputi beberapa hal: a) agama yang disajikan dalam proses pendidikan harus lebih menekankan kepada kesalehan aktual bukan semata-mata kesalehan ritual. Hal ini penting ditekankan mengingat millennium ketiga akan semakin diwarnai selain oleh trust juga oleh kompetisi, b) pendidikan Islam harus mempunyai generasi terdidik yang pluralis yang mampu menghadapi kemajemukan baik internal maupun eksternal. c) pengembangan sifat pluralis tersebut harus merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya besar mewujudkan masyarakat madani yang

demokratis, terbuka dan beradab yang menghargai perbedaan pendapat. Justru selalu diupayakan sebagai rahmat bukan sebagai laknat.d) masyarakat madani yang diharapkan adalah masyarakat yang penuh percaya diri, memiliki kemandirian dan kreatifitas yang tinggi dalam memecahkan masalah yang dihadapi, e) pendidikan yang dilakukan harus menyiapkan generasi yang siap berpartisipasi aktif dalam interaksi global, hal ini pengetahuan dan keterampilan yang diberikan harus memiliki relevansi yang kuat dengan trend globalisasi (Bahruddin; 2011).

Selain memiliki tantangan dan peluang, pendidikan Islam juga harus memperhatikan beberapa hal lain diantaranya yaitu: *pertama*, peningkatan mutu sumber daya manusia, diantara tuntutan internal dan tantangan eksternal, maka keunggulan yang mutlak dimiliki oleh peserta didik adalah penguasaan atas sains dan teknologi dan keunggulan kualitas sumber daya manusia (Fauzi, 2018), *kedua*, menyiapkan kurikulum yang handal yang berwawasan masa kini dan masa depan. Kurikulum ini diharapkan dapat menciptakan manusia-manusia yang memiliki kemampuan yang berkualitas dan memiliki keterampilan dan kecakapan dalam hidup (Fauzi, 2009). *ketiga*, sarana dan prasarana yang memadai dan merupakan unsur penting yang sangat menunjang bagi kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana akademik mutlak perlu, baik berupa perpustakaan, gedung, pembelajaran, dan lain sebagainya. *keempat*, mendekonstruksi metode dan manajemen. Metodologi dan manajemen yang selama ini kita pakai harus dirubah dan dibangun lagi yang baru, yang dapat membawa semangat dan konsep baru sehingga menghasilkan tujuan tersebut sesuai dengan masyarakat modern. *kelima*, pengembangan ilmu sosial profetik. Ilmu sosial profetik adalah ilmu sosial yang dalam pengembangan ilmu, didasarkan dengan konsep keilahian (Kuntowijoyo, 2011), dengan Ilmu sosial profetik yang dibangun dari ajaran Islam, kita tidak perlu takut atau khawatir terhadap dominasi sains barat dan arus globalisasi yang terjadi saat ini (Abuddin Nata; 2003).

Senada dengan pendapat tersebut di atas yaitu dalam rangka menghadapi tantangan zaman ini pendidikan Islam harus melaksanakan pendidikan tetap dalam pilarnya. Pilar-pilar pendidikan Islam tersebut dibangun atas dasar tauhid, hubungan yang harmonis antara Allah SWT, manusia, dan alam, berorientasi pada moralitas Islam dan akhlak mulia, kesucian manusia dan menjadikan masjid sebagai pusat peradaban (Abdurrahman Assegaf; 2011). Karena dalam pandangan Islam ilmu, amal, dan

akhlak hendaknya berintikan dan menimbulkan iman dalam diri seseorang. Rasulullah saw bersabda bahwa: “Baragsiapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah imannya, maka baginya tidak tambah apapun disisi Allah swt. Kecuali semakin jauh darinya”. Dengan demikian, domain ilmu, amal, dan akhlak diatas amsih perlu diteruskan lagi dengan domain iman yang merupakan inti dari pendidikan Islam. Domain iman ini merupakan manifestasi dari nilai spritualitas dan emosional manusia yang sadar akan makna dirinya dalam hubungannya dengan Allah SWT, orang lain, lingkungan (Abdurrahman Assegaf, 2011).

Mencermati berbagai tantangan di atas, maka tidaklah mustahil pendidikan Islam dapat memainkan peran penting dan strategis dalam mewujudkan masyarakat madani. Karena bagaimanapun pendidikan Islam setidaknya memiliki dua misi yang harus diemban, yaitu *pertama* Menanamkan pemahaman Islam secara komperhensif agar peserta didik mampu mengetahui ilmu-ilmu Islam sekaligus mempunyai kesadaran untuk mengamalkannya. Pendidikan Islam tidak semata-mata mengajarkan pengetahuan Islam secara teoritik saja sehingga hanya menghasilkan seorang cendikiawan muslim, tetapi Islam juga menekankan pada pembentukan sikap dan prilaku yang islami dengan membentuk peserta didik menjadi Insan Kamil. *Kedua*, memberikan bekal kepada peserta didik agar nantinya dapat berkiprah dalam kehidupan masyarakat, serta *survive* menghadapi berbagai tantangan yang semakin tidak terkendali (Bahrudin, 2011). Dengan dua misi di atas, maka tidaklah berlebihan bahwa pendidikan Islam memiliki peran penting dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kualitas intelektual yang tinggi, kepribadian yang tangguh, kreatifitas dan keterampilan yang memadai, melainkan juga yang sangat penting dan harus menjadi dasar yaitu memiliki akhlak dan budi pekerti serta iman yang kokoh dan kuat sehingga upaya dalam mewujudkan masyarakat madani bukan sekedar slogan belaka.

Kesimpulan

Dengan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan agama, maka bangsa dan negara terus melakukan inovasi-inovasi demi kemajuan bangsanya. Hal ini pastinya berpengaruh pada ragam budaya dan pola pikir masyarakatnya. Masyarakat semula *primitive*, awam, gagap tekhnologi mulai berubah menjadi masyarakat yang berperadaban tinggi dengan kata lain bisa berubah menjadi masyarakat madani. Mebentuk masyarakat madani tidaklah mudah, karena hal ini berkaitan dengan kehidupan sosio cultural masyarakat yang smula sudah

terbentuk, meskipun terdapat beberapa kelemahan yang didapati oleh pendidikan Islam dalam pengupayakannya, melalui proses akhirnya masyarakat madani tersebut bisa terwujud. Melalui, pendidikan-pendidikan Islam baik di lembaga formal maupun non formal, lembaga-lembaga majlis ta'lim yang juga ikut berpartisipasi dalam melakukan perubahan pola pikir dan perilaku, pendidikan karakter sebagai penguat dalam pembentukan masyarakat madani juga sangat besar perannya dimana penguatan-penguatan tersebut dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan tingkah laku dan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang dianut oleh warga masyarakat.

Keberhasilan pembentukan masyarakat madani bisa dilihat dengan adanya toleransi agama yang terjalin, saling hormat menghormati dg keberagaman agama dan budaya di Indonesia, saling tolong menolong, menjunjung tinggi harkat martabat dan hak kewajiban, masyarakat yang semula primitive dan awam mulai berubah menjadi masyarakat yang melek teknologi dan berilmu tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2017). Pendidikan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal Dalam Praktik Sosial di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur. *Proceedings Ancoms 1St Annual Conference For Muslim Scholars*, (110), 715-725.
- Al-Attas, Muhammad Nuquib. (1994). *Konsep Pendidikan Islam*, Terj. Haidar Bagir. Bandung : Mizan.
- al-Qurthubiy, Ibn Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshary. *Tafsir Qurthuby*, Juz 1. Kairo : Dar al- Sya'biy.
- Al-Syaibani, Omar Muhammad Al-Thoumy. (1979). *Falafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- An-Nahlawi, Abdurrahman. (1992). *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*. Bandung : CV. Diponegoro.
- An-Nahlawi, Abdurrahman. *Prinsip-Prinsip dan Metode*. Bandung: Angkasa.
- Assegaf, Abd. Rachman. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam Paradigma baru pendidikan Hadhari berbasis Integratif-Interkonektif*. Jakarta: PT.Rajagrfindo
- Baharun, H. (2012). *Desentralisasi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan*

- Sistem Pendidikan Islam. *Jurnal At-Tajdid*, 1(2).
- Baharun, H. (2016). Pemikiran Pendidikan Perspektif Filsuf Muslim (Kajian Kritis terhadap Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal). *At-Turas*, 3(1).
- Baharun, H. (2017). Total Moral Quality: A New Approach for Character Education in Pesantren. *Ulumuna*, 21(1), 57-80.
- Bali, M. M. E. I. (2013). Analisis Buku Teks BSE Karangan I.S. Sadiman dan Shendy Amalia Mata Pelajaran IPS Kelas 4 SD di Gugus VI Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. *Jurnal KSDP FIP UM*, (4).
- Bali, M. M. E. I. (2015). Penerapan Model Pembelajaran Fan N Pick dan Two Stay Two Stray Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial dan Hasil Belajar IPS Siswa. *Jurnal Manajemen FE UM*.
- Bali, M. M. E. I. (2017). Perguruan Tinggi Islam Berbasis Pondok Pesantren. *Al-Tanzim*, 1(2), 1-14.
- Din Syamsudin, M. (2002). *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Fauzi, A. (2009). *Strategi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Studi Komparatif di Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Islam Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fauzi, A. (2015a). Membangun Epistemologi Pendidikan Islam Melalui Kepemimpinan Spiritual: Suatu Telaah Diskursif. *Empirisma STAIN Kediri*, 24(2), 155-167.
- Fauzi, A. (2015b). Pengembangan Human Relation Perspektif Nilai-nilai al-Qur'an. *Mutawatir UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1(2), 168-179.
- Fauzi, A. (2016). Transformation Of Values In Developing Leadership Prophetic Islamic Education. In *2nd ICET Theme: Improving The Quality Of Education and Training Through Strengthening Networking* (pp. 1196-1204). Faculty of Education, State University of Malang.
- Fauzi, A. (2017a). Building Transformative Management Epistemology at Pondok Pesantren Based on Local Wisdom. In *Proceedings of the 1 st International Conference on Education and Islamic Culture "Rethinking Islamic Education Toward Cultural Transformation"* Faculty of Tarbiyah, Islamic Institute of Nurul Jadid Probolinggo (pp. 199-203). Probolinggo.
- Fauzi, A. (2017b). Persepsi Barakah Di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Perspektif Interaksionalisme Simbolik. *Al-Tahrir*, 17(1), 105-132.

- Fauzi, A. (2018). Human Resource Management dalam Meningkatkan Mutu Dosen PTKIS. *At-Ta'lim INZAH Genggong Probolinggo*, 4, 1(Pendidikan Islam), 21-34.
- Fauzi, A. (2018). Konstruksi Pendidikan Pesantren; Diskursus Terhadap Fundamentalisme dan Liberalisme dalam Islam. *Al-Tahril IAIN Ponorogo*, Vol.18(Islam: Liberalism & Fundamentalism), 89-114.
- Fauzi, A. (2018). Transkulturasi Social Capital Pesantren; Sebagai Paradigma Pendidikan Islam Moderat. In *2St Annual Conference For Muslim Scholars, Strengthening The Moderate Vision of Indonesia Islam* (Vol. II, pp. 751-765). Surabaya.
- Jalal, Abdul Fatah. (1988). *Azaz-azaz Pendidikan Islam*, Terj. Harry Noer Ali. Bandung: CV. Diponegoro.
- Komaruddin Hidayat dan Azyumari Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk aksi, dalam Pendidikan Islam dan isu-isu sosial*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2011)
- Marimba, Ahmad D. (1989). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung Al-Ma'arif
- Muali, C. (2017). Rasionalitas Konsepsi Budaya Nusantara dalam Menggagas Pendidikan Karakter Bangsa Multikultural. *Jurnal Islam Nusantara*, 1(1), 105-117
- Muhammad Fadhil Al-Jamaly, *nahwa Tarbiyat Mukminat*, (al-syirkat al-Tunisiyat li al-Tauzi' 1977)
- Mundiri, A. (2016). Strategi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Membangun Branding Image. *Pedagogik*, 3(2), 58-72.
- Mundiri, A. (2017). Organizational Culture Base On Total Quality Management In Islamic Educational Institution. *ADRI International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(1), 1-11.
- Mushfi, M., & Iq, E. (2017). Model Interaksi Sosial Dalam Mengelaborasi Keterampilan Sosial. *Jurnal Pedagogik*, 4(2), 211-227.
- Nata, Abudin. (2003). *Kapita selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa.
- Syalabi, Ahmad. (1945). *Tarikh al-Tarbiyah al-Islamiyat*. Kairo : al-Kasyaf.
- Tafsir, Ahmad. (1992). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.